

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *New Southern Policy* Korea Selatan menargetkan Asia Tenggara, khususnya Indonesia sebagai mitra strategis dalam implementasi salah satu pilarnya, yaitu prinsip *prosperity* yang diwujudkan melalui IK-CEPA melalui proyek investasi Hyundai EV Battery Plant (HLI Green Power). Dalam pelaksanaannya, baik dalam hubungan bilateral yang tercipta dalam kerangka kerja sama ekonomi serta tantangan dan upaya dalam proyek investasi tersebut, interdependensi kompleks digunakan untuk melihat ke dalam secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya, proyek investasi ini menghadapi sejumlah tantangan yang memperlihatkan kompleksitas dari implementasi prinsip *prosperity* di lapangan. Tantangan pertama adalah kompleksitas regulasi di Indonesia, yang mencakup tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterlambatan dalam proses perizinan, dan fragmentasi institusional. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun IK-CEPA telah dirancang untuk memfasilitasi investasi, realitas birokrasi di lapangan masih menjadi hambatan signifikan. Tantangan kedua adalah fluktuasi pasar dan dinamika industri kendaraan listrik global, termasuk ketidakstabilan harga nikel dan fenomena *EV chasm*, yaitu perlambatan adopsi kendaraan listrik akibat biaya tinggi dan infrastruktur pengisian daya yang belum memadai.

Kedua tantangan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip *prosperity* NSP. Prinsip ini tidak hanya menekankan peningkatan investasi, tetapi juga mengharuskan adanya efisiensi regulasi, stabilitas pasar, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Ketika tantangan-tantangan tersebut muncul, Korea Selatan dan Indonesia harus bekerja sama untuk mengatasinya. Sebagai respons terhadap tantangan-tantangan tersebut, Korea Selatan dan Indonesia melakukan berbagai upaya yang mencerminkan prinsip *prosperity* sebagai proses dinamis dan adaptif secara kolaboratif.

Tamara Pinka Theresia, 2025

UPAYA KOREA SELATAN DAN INDONESIA DALAM MENGATASI TANTANGAN IMPLEMENTASI PRINSIP PROSPERITY NEW SOUTHERN POLICY: *Studi Kasus Proyek Investasi Hyundai EV Battery Plant (HLI GREEN POWER) 2023-2025*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam menghadapi tantangan dalam proyek investasi Hyundai EV Battery Plant, berbagai upaya kolaboratif antara Korea Selatan dan Indonesia dilakukan. Pemerintah Korea Selatan melalui Hyundai Motor Group beradaptasi dengan melakukan diversifikasi pasokan bahan baku dan memperluas mitra distribusi ke produsen lain seperti BYD dan Wuling. Pemerintah Indonesia merespons dengan memperluas cakupan kebijakan insentif, seperti pembebasan pajak impor komponen, kemudahan izin pembangunan stasiun pengisian, dan program subsidi untuk pembeli kendaraan listrik. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menciptakan permintaan domestik dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai EV global.

Dengan demikian, Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proyek Hyundai EV Battery Plant (HLI Green Power) memperkuat pentingnya kerja sama bilateral yang adaptif dan responsif secara kolaboratif. Ketika kedua negara saling mengatasi hambatan dan memperoleh manfaat bersama, maka terbentuklah interdependensi kompleks yang menjadi fondasi hubungan strategis antara Korea Selatan dan Indonesia di era diplomasi ekonomi modern. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa prinsip *prosperity* bukan tujuan statis, melainkan proses dinamis yang membutuhkan adaptasi dan kolaborasi intensif antara kedua negara melalui berbagai pendekatan strategis dalam mengatasi hambatan struktural dan pasar yang kompleks.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan temuan analisis, keberhasilan implementasi prinsip *prosperity* NSP melalui IK-CEPA sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusional dalam negeri, khususnya dalam mengelola investasi strategis di sektor teknologi tinggi seperti kendaraan listrik. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan difokuskan kepada beberapa ranah berikut. Pertama, dibutuhkan upaya harmonisasi regulasi lintas sektor untuk

menyederhanakan proses perizinan, mengurangi tumpang tindih kewenangan, dan mempercepat realisasi investasi. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan *single-window service* di bawah kementerian investasi, yang terintegrasi dengan kementerian teknis seperti ESDM dan Perindustrian, guna mempercepat pelayanan administratif dan menjamin kepastian hukum. Selain itu, dibutuhkan optimalisasi *regulatory sandbox* dan harmonisasi regulasi dimana Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperluas cakupan *regulatory sandbox* di sektor EV dan menjadikannya skema permanen dengan melibatkan pelaku industri secara langsung dalam perumusan kebijakan serta dapat menguji skema investasi dan produksi bagi model bisnis mereka dalam sistem regulasi yang fleksibel tanpa mengabaikan standar internasional.

Kedua, perlu adanya penguatan kapasitas birokrasi dan reformasi tata kelola kelembagaan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga. Pemerintah dapat membentuk *task force khusus untuk industri strategis*, termasuk kendaraan listrik, guna menjembatani kesenjangan antara level kebijakan dan eksekusi lapangan. Ketiga, Indonesia harus aktif mengelola persepsi risiko dengan menyusun kerangka transparansi investasi yang berbasis insentif performatif misalnya *tax holiday* berbasis target produksi, alih teknologi, dan penyerapan tenaga kerja untuk memastikan kualitas investasi jangka panjang, bukan hanya jumlahnya.

Kemudian, perlu adanya peningkatan kepercayaan bagi investor untuk melakukan investasi melalui transparansi. Pemerintah sebaiknya menerbitkan *public investor dashboard* berisi status proyek strategis, kebijakan fiskal, dan jadwal implementasi. Transparansi ini akan meningkatkan persepsi investor terhadap stabilitas dan akuntabilitas kebijakan. Ditambah dengan peningkatan kesadaran publik terkait industri EV, dimana dapat dilakukan melalui kampanye publik berskala nasional untuk edukasi EV. Pemerintah dan swasta perlu mengintensifkan kampanye literasi publik mengenai manfaat EV melalui kerja sama dengan komunitas otomotif, universitas, dan media sosial.

Tamara Pinka Theresia, 2025

UPAYA KOREA SELATAN DAN INDONESIA DALAM MENGATASI TANTANGAN IMPLEMENTASI PRINSIP PROSPERITY NEW SOUTHERN POLICY: Studi Kasus Proyek Investasi Hyundai EV Battery Plant (HLI GREEN POWER) 2023-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

6.2.2 Saran Teoritis

Saran untuk kajian akademik dan/atau pengembangan keilmuan dalam studi Hubungan Internasional, dimana perlu adanya penelitian lanjutan terkait eksplorasi interdependensi kompleks dalam bagaimana kerja sama CEPA tidak hanya memfasilitasi perdagangan, tetapi juga membentuk konfigurasi interdependensi yang lebih dalam melalui diplomasi energi hijau dan teknologi lintas negara. Perluasan aplikasi teori interdependensi kompleks juga kiranya dapat dilakukan, dimana penelitian selanjutnya dapat mengadopsi kerangka interdependensi kompleks dalam ranah regional Asia Tenggara dan/atau Asia Pasifik untuk menganalisis kerja sama multilateral antar *middle powers* pada suatu kawasan tertentu.

Kemudian, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan pendalaman konsep *Multi-Level Governance* untuk menelaah interaksi vertikal antara pusat–daerah dan lintas lembaga dalam implementasi perjanjian ekonomi. Penelitian selanjutnya dapat menyoroti bagaimana implementasi CEPA dipengaruhi oleh dinamika *governance* di level lokal, nasional, dan internasional, termasuk bagaimana pemerintah lokal dan BUMN memainkan peran dalam negosiasi kebijakan.

Lebih lanjut, untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan integrasi pendekatan ekonomi politik ke dalam Studi CEPA. Kajian CEPA sebaiknya tidak hanya dilihat dari liberalisasi tarif, tapi juga melalui analisis ekonomi politik, termasuk aktor dominan, *bargaining position*, dan dampak terhadap industrialisasi domestik. Kemudian, dapat juga dikaitkan dengan konsep *economic vulnerability and resilience* di tengah krisis pasar, penting untuk mengevaluasi bagaimana konsep *economic vulnerability and resilience* dapat dijadikan landasan bagi diplomasi kerja sama bilateral dalam kerangka CEPA